

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Kesos No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pemerintah Indonesia, UU Kesos No. 11 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial, 2009), kemudian dilanjutkan dengan PERMENSOS 08 TAHUN 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pemerintah Indonesia, PERMENSOS 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, 2012), pemerintah melakukan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aspek ekonomi. Maka dari itu pemerintah memberikan bantuan pematik baik itu berupa dana ataupun dalam bentuk lainnya baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal menciptakan usaha kecil menengah. Pemerintah tentunya sudah memberikan kebijakan tersebut, tetapi kebijakan tentang pemberian bantuan tetap harus dikawal dan dievaluasi. Dalam mengerjakan pekerjaannya, pemerintah tidak akan berkeja secara *independent*, tentu harus melibatkan *element* masyarakat langsung seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Masyarakat, atau yang masuk kedalam PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) untuk menanggulangi masalah sosial yang masuk kedalam kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat

usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut Kementerian Sosial RI saat ini tercatat ada 6 jenis PSKS yaitu, Pekerja Sosial Profesional, Tagana, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dunia Usaha.

Untuk mengidentifikasi peserta PMKS perlu dilakukan pendataan setiap tahunnya, agar data yang masuk dapat *ter-update* kemudian menjadi acuan untuk keputusan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan dengan tepat. Dalam pendataan program penerima bantuan ini masih menggunakan sistem manual dimana pencatatan data penduduk untuk mendapat bantuan PMKS, masih tercatat didalam buku tulis dan laporan kertas sebagai arsip, ini dirasa sangat memerlukan sistem yang baru yaitu sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis web, guna memberikan kemudahan dalam pendataan untuk menentukan penerima bantuan PMKS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sebuah *prototype* sistem untuk perancangan *Decision Support System* penyaluran bantuan PMKS menggunakan metode *Weighted Product* (WP)?
2. Bagaimana unjuk kerja *Decision Support System* penyaluran bantuan PMKS menggunakan metode *Weighted Product* (WP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuat suatu *prototype* sistem pendukung keputusan penyaluran bantuan PMKS menggunakan metode *Weighted Product* (WP) di kelurahan Sariharjo, Ngaglik, Sleman secara efektif.
2. Mengetahui unjuk kerja sistem pendukung keputusan penyaluran bantuan PMKS menggunakan metode *Weighted Product* (WP).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat membantu dalam memberikan prioritas untuk masyarakat yang mendapatkan penyaluran bantuan PMKS.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini masalah dibatasi berdasarkan belum dapatnya menyimpan lebih dari satu kali transaksi atau belum dapat menyimpan *history* per periode.

